

Analisis Efisiensi Keuangan Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Nias Utara

Setiaman Nazara¹, Nanny A. Buulolo², Idarni Harefa³, Heniwati Gulo⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

E-mail: setiamannazara77@gmail.com¹, nannyartatinabll@gmail.com²,
idarniharefa@gmail.com³, henygulo75@gmail.com⁴

Article History:

Received: 21 September 2025

Revised: 30 Oktober 2025

Accepted: 03 November 2025

Keywords:

Efisiensi keuangan, perencanaan anggaran dan value for money

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, peran, kendala, dan dampak efisiensi pengelolaan keuangan terhadap kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait efisiensi pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, efisiensi pengelolaan keuangan dicapai melalui perencanaan berbasis kinerja, pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas, pemanfaatan teknologi digital, serta akurasi data. Kendala yang muncul meliputi keterbatasan dana, proses pencairan yang lambat, serta kurangnya SDM teknis. Meskipun demikian, realisasi anggaran rata-rata mencapai lebih dari 90%, menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup tinggi. Efisiensi ini berdampak positif terhadap percepatan pembangunan, khususnya penyediaan rumah layak huni dan fasilitas sanitasi bagi masyarakat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, serta digitalisasi pengelolaan keuangan berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi organisasi. Dengan demikian, strategi pengelolaan keuangan yang efektif dapat mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

PENDAHULUAN

Di dalam sebuah organisasi, anggaran memiliki peran yang sangat penting sebagai rencana keuangan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan organisasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan keterbukaan dan tanggung jawab publik, setiap lembaga pemerintah diharuskan untuk memperbaharui dan meningkatkan performanya agar lebih fokus pada penciptaan pelayanan publik yang baik dan tata kelola yang baik. Anggaran publik adalah suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan dari suatu organisasi seperti informasi tentang pendapatan, aktifitas dan belanja. Penganggaran sektor publik berhubungan dengan proses untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktifitas yang biasanya dalam satuan moneter.

Peningkatan efisiensi tidak hanya berdampak pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan organisasi dengan pemborosan anggaran dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Dengan demikian, organisasi yang mampu mengimplementasikan praktik efisien akan memiliki keunggulan kompetitif, serta meningkatkan reputasi sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan fokus pada efisiensi, organisasi dapat mengoptimalkan proses operasional dan meningkatkan kepuasan kerja melalui pencapaian hasil yang lebih cepat dan berkualitas tinggi. Dengan strategi yang berfokus pada efisiensi juga dapat menciptakan peluang inovasi, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan kebutuhan dengan lebih baik dan mengembangkan pola kerja baru yang memenuhi ekspektasi tinggi (Majid, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana sumber daya dimanfaatkan untuk menerapkan kebijakan tentang anggaran. Ada kalanya anggaran yang telah direncanakan dengan matang tidak dieksekusi dengan baik, tetapi tidak mungkin anggaran yang kurang terencana bisa dilaksanakan dengan baik. Proses persiapan anggaran yang efektif adalah langkah awal yang logis dan juga kronologis. Meski begitu, pelaksanaan menjadi rumit karena adanya sistem yang mengatur kepatuhan terhadap program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun estimasi sudah dilakukan dengan baik, perubahan mendadak yang tidak terduga tetap akan terjadi di tahun yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam anggaran. Perubahan tersebut tentunya harus ditangani dengan cara yang selaras dengan tujuan utama agar aktivitas program dan kegiatannya tidak terhambat. Pengeluaran anggaran daerah seharusnya berlandaskan pada prinsip ekonomi yang wajar, efisiensi, dan efektivitas, maka sistem penganggaran diubah menjadi sistem yang berfokus pada kinerja. Dengan penerapan sistem anggaran yang fokus pada hasil, diharapkan anggaran daerah menjadi lebih jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat merancang anggaran daerah menggunakan pendekatan berbasis kinerja, penting untuk menetapkan indikator kinerja bagi setiap unit kinerja yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam beragam program dan aktivitas yang mudah diukur.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam demi efisiensi penggunaan keuangan, sehingga dibutuhkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran (Widodo, 2019). Setiap organisasi, baik sektor publik maupun swasta, memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah, perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan anggaran sebagai instrumen utama untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Anggaran bukan hanya merupakan rencana

keuangan tahunan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur dasar, khususnya di bidang perumahan dan pemukiman. Dengan tugas tersebut, unit ini mengelola anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan alokasi dana, birokrasi penganggaran yang kompleks, serta lemahnya sistem pengawasan internal yang dapat berdampak pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023 dan 2024, total anggaran belanja yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 41,9 miliar. Namun realisasi anggarannya mencapai Rp39,49 miliar, atau sebesar 94,25%. Angka tersebut memang menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, namun hal ini belum tentu menggambarkan efisiensi yang sebenarnya jika tidak diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap *input- output* dari pelaksanaan program- program yang dibiayai anggaran tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan dan Ayuningtyas (2010), efisiensi sektor publik baru dapat dinilai ketika rasio efisiensi melebihi satu dan memberikan hasil kerja dengan penggunaan sumber daya minimal. Maka dari itu, penting dilakukan pengkajian untuk memastikan apakah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara telah mengelola anggaran secara efisien dan apakah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan telah memberikan dampak yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) menuntut adanya ukuran kinerja yang jelas dan indikator efisiensi yang terukur pada setiap unit kerja. Namun kenyataannya, dalam implementasinya seringkali tidak disertai dengan sistem evaluasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk mengevaluasi efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam menilai sejauh mana efisiensi keuangan telah dilaksanakan di satuan kerja tersebut, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara ilmiah dengan mengangkat judul: Analisis Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara”.

LANDASAN TEORI

Efisiensi

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efisiensi merupakan bagian dari prinsip value for money, bersama dengan efektivitas dan ekonomis. Efisiensi menekankan pada rasio yang ideal antara sumber daya yang digunakan dengan output atau kegunaan yang diperoleh. Menurut Widiyana (2016), mengatakan bahwa pengukuran efisiensi menentukan sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi di sektor publik sesuai dengan sasaran pendapatan yang telah ditetapkan untuk sektor publik. Tingkat efisiensi dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100 \%$$

Realisasi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2021), realisasi anggaran menggambarkan tingkat pencapaian penggunaan dana yang telah direncanakan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi anggaran mengindikasikan kemampuan efektif dan efisien organisasi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Prinsip-Prinsip Efisiensi

Prinsip-prinsip efisiensi terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Perencanaan Anggaran
- b. Penyederhanaan
- c. Tepat guna
- d. Tepat waktu pelaksanaan
- e. Penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Keuangan

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi keuangan pada sektor perumahan dan pemukiman menurut Santoso (2021) adalah:

- a. Perencanaan Anggaran
Perencanaan yang matang akan mengurangi risiko pemborosan anggaran.
- b. Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Monitoring yang baik dapat mendeteksi ketidakefisienan dalam penggunaan dana.
- c. Sumber Daya Manusia
Kompetensi pegawai dalam mengelola anggaran turut berpengaruh pada efisiensi keuangan (Iskandar, 2020).
- d. Teknologi dan Digitalisasi
Penggunaan sistem digital dalam manajemen keuangan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan (Fahmi, 2023).
- e. Studi Empiris tentang Efisiensi Keuangan dalam Sektor Publik
Beberapa penelitian yang relevan dengan efisiensi keuangan dalam sektor publik telah dilakukan sebelumnya.

Indikator Efisiensi Keuangan

Menurut Widodo (2022), menguraikan beberapa indikator efisiensi keuangan dalam instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

- a. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Operasional.
Rasio ini menunjukkan proporsi belanja modal yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur daerah dibandingkan dengan belanja operasional yang lebih sering digunakan untuk kegiatan rutin. Peningkatan rasio ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut lebih fokus pada pembangunan jangka panjang daripada hanya pada belanja rutin.
- b. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
Indikator ini menggambarkan sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokal (PAD) untuk membiayai belanja daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien daerah dalam menggali sumber pendapatan internal, mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat.
- c. Rasio Penggunaan Dana untuk Program Prioritas.

Efisiensi keuangan juga tercermin dari alokasi dana yang tepat untuk program-program prioritas daerah yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jika dana lebih banyak digunakan untuk program yang memberikan dampak signifikan, maka efisiensi keuangan dapat dikatakan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta data yang diperoleh dari informan penelitian. Data primer diperoleh peneliti secara langsung mengumpulkan data dari sumber pertama atau lokasi di mana penelitian berlangsung dan sumber data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, serta website yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian penelitian melakukan wawancara terhadap lima orang informan penelitian yang bekerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara. Setelah data terkumpul dan wawancara telah dilaksanakan, maka Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara

Berdasarkan hasil analisis data keuangan, diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2023 mencapai **90,51%** dari total anggaran Rp. 19,5 miliar, dengan realisasi sebesar Rp. 17,65 miliar. Pada tahun 2024, tingkat realisasi meningkat hingga 97,7% dari alokasi Rp. 22,4 miliar, dengan realisasi sebesar Rp. 21,84 miliar. Secara rata-rata, realisasi selama dua tahun mencapai 94,25%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara memiliki tingkat efektivitas operasional yang tinggi, karena mampu merealisasikan hampir seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini sejalan dengan kerangka teoretis manajemen keuangan publik menurut Halim (2002) yang menekankan bahwa efektivitas dapat diukur melalui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program.

Namun, realisasi belanja yang tinggi ini ternyata menyimpan paradoks fiskal yang cukup serius. Berdasarkan data dalam Tabel 4.1, pada tahun 2024, jumlah pendapatan daerah tercatat Rp. 0,00, sedangkan belanja daerah mencapai Rp. 4,65 miliar. Kondisi ini mengakibatkan defisit sebesar Rp. (4,65 miliar), yang kemudian ditutupi melalui pinjaman dari Bank Sumut Cabang Gunungsitoli. Artinya, meskipun belanja terealisasi dengan baik, sumber pendanaan sepenuhnya bergantung pada dana eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam merealisasikan program berjalan beriringan dengan kelemahan dalam efisiensi fiskal, karena kemandirian keuangan daerah tidak tercapai.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional Dinas memang tercapai melalui realisasi belanja yang tinggi, tetapi efisiensi fiskal belum terpenuhi. Dengan demikian, capaian ini lebih merefleksikan efektivitas teknis daripada efisiensi keuangan yang berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap efisiensi keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang dilakukan cenderung bersifat reaktif. Kepala Dinas,

Arisman Hulu, menegaskan bahwa keterbatasan dana memaksa pihaknya untuk melakukan *refocusing* pada program prioritas, serta mengurangi alokasi pada kegiatan non-esensial. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi alokatif, di mana dana terbatas difokuskan pada program-program vital seperti pembangunan rumah layak huni.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Data menunjukkan jumlah pegawai berkurang dari 19 orang menjadi 16 orang. Secara finansial, hal ini mengurangi beban belanja pegawai dan menimbulkan kesan adanya efisiensi, karena realisasi belanja pegawai tetap tinggi (92–93%). Namun, dari sisi operasional, keterbatasan tenaga teknis justru mengurangi kapasitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, efisiensi yang tercapai lebih tepat disebut sebagai *efisiensi semu*.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Wawancara dengan Sekretaris Dinas, Noferman Syukur Lahagu, dan Kepala Seksi, Aguslin Sabtian Halawa, menegaskan bahwa penggunaan aplikasi keuangan daerah dan sistem digital memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi. Teknologi digital mempersingkat birokrasi, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Temuan ini sesuai dengan teori Fahmi (2023) mengenai peran digitalisasi dalam meningkatkan kinerja keuangan publik.

4. Pengawasan Internal

Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan BPKP membantu menjaga penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan aturan dan mencegah penyimpangan. Pengawasan ini memberikan dorongan bagi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

5. Faktor Eksternal

Keterlambatan transfer dana dari pusat serta kenaikan biaya operasional menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi. Faktor eksternal ini menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh dinas.

Secara keseluruhan, efisiensi keuangan pada Dinas dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti perencanaan, SDM, dan teknologi digital, serta faktor eksternal berupa kebijakan dan transfer dana dari pemerintah pusat.

Realisasi Pelaksanaan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara

Analisis realisasi anggaran berdasarkan pos belanja memperlihatkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran terealisasi dengan baik. Belanja Modal terealisasi **100%** pada tahun 2023 dan 2024, sementara Belanja Barang dan Jasa mencapai realisasi **97,27%**. Namun, terdapat beberapa pos belanja dengan realisasi 0%, seperti belanja makanan rapat dan belanja jasa pengiriman. Dana ini ditahan sebagai cadangan untuk kebutuhan insidental, yang menunjukkan adanya pola pengelolaan konservatif dalam pelaksanaan anggaran.

Lebih lanjut, keterkaitan antara realisasi belanja dengan capaian fisik dapat dilihat pada Tabel 4.36. Program pembangunan rumah layak huni dengan realisasi 95% berhasil menyelesaikan 190 unit rumah. Program perbaikan fasilitas permukiman dengan realisasi 92% berhasil memperbaiki 46 fasilitas. Sementara itu, pelatihan SDM dengan realisasi 96% telah memberikan peningkatan kompetensi kepada 20 staf. Fakta ini menunjukkan adanya korelasi

positif antara realisasi anggaran dan output program, di mana meskipun terdapat keterbatasan fiskal, manfaat nyata bagi masyarakat tetap dapat diwujudkan.

Interpretasi ini menegaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara sudah cukup baik dalam hal realisasi anggaran dan pencapaian fisik, meskipun kemandirian fiskal masih menjadi tantangan serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Efisiensi Keuangan
Efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara tergolong baik. Hal ini terlihat dari tingkat rata-rata realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 90% dalam kurun waktu 2023-2024. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, *value for money*, dan digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi.
- b. Faktor-faktor Efisiensi
Faktor-faktor yang mendukung efisiensi keuangan mencakup perencanaan anggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran berdasarkan prioritas, pemanfaatan teknologi digital, serta akurasi data dalam perencanaan. Meskipun demikian, terdapat kendala yang mempengaruhi, yaitu keterbatasan dana, lambatnya proses pencairan, dan kurangnya sumber daya manusia teknis.
- c. Realisasi Keuangan
Realisasi anggaran belanja dan pendapatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara menunjukkan tingkat capaian yang tinggi. Realisasi pendapatan dari dana transfer mencapai 95-98% dan realisasi belanja mencapai 90-93% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dinas mampu mengoptimalkan penerimaan dan mengendalikan pengeluaran dengan baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan adanya paradoks: dinas berhasil efektif secara operasional, tetapi belum efisien secara fiskal. Dengan kata lain, efisiensi yang dicapai masih parsial dan belum menjamin keberlanjutan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan multi-tahun, penguatan SDM, dan peningkatan kemandirian fiskal agar prinsip *value for money* dapat terwujud secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Fahmi. (2023). Pengaruh Digitalisasi terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 12(1), 45-60.
- Halim. (2022). Efisiensi Keuangan Sektor Publik: Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 101-115.
- Iskandar. (2020). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 78-89.
- Majid. (2023). Efisiensi organisasi dan pengelolaan anggaran: Kontribusi terhadap keberlanjutan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Mardiasmo. (2021). Pengukuran Efisiensi Keuangan melalui Rasio Input Output. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 22-35.
- Nordiawan, & Ayuningtyas. (2010). Evaluasi Efisiensi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 45-60.

- Santoso. (2021). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Keuangan Sektor Perumahan dan Permukiman. *Jurnal Perumahan dan Permukiman*, 3(1), 15,29.
- Widiyana. (2016). Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 4(2), 67-79.
- Widodo. (2019). Kajian efisiensi penggunaan keuangan daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(1), 50-65.